



RENCANA KERJA 2021



**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



bptj151



bptjkemenhub



bptj@dephub.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN	4
2.1 PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2019-2020	4
2.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021	11
3.1 PERUBAHAN REDESIGN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ...	11
3.2 SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPTJ TAHUN 2021	12
3.3 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2021	14
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2021 BPTJ	17
3.5 ISU STRATEGIS TAHUN 2021.....	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

Memasuki pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, pembangunan infrastruktur di wilayah Jabodetabek menjadi bagian dari salah satu fokus pemerintah. RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi dokumen perencanaan nasional yang dipergunakan sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya dijabarkan secara tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja BPTJ merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang memuat Sasaran Program BPTJ (SP), Indikator Kinerja Program BPTJ (IKP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat (IKK) dan target pembangunan yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran berjalan, dimana selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan atau kinerja BPTJ.

Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan untuk Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029.

Dalam rangka ikut menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang unggul dan berstandar internasional, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas utama mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Secara umum Rencana Kerja BPTJ Tahun 2020 memuat kegiatan pendukung kebijakan pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek yang akan dibiayai melalui APBN dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja BPTJ pada tahun 2019 secara singkat, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2020.

Berdasarkan cakupan tersebut, sebagai unit kerja yang memiliki kegiatan utama mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, pasal 2 dan 3, fungsi BPTJ terdiri dari :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- 3) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 4) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 5) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/ atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 6) Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 8) Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- 9) Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 11) Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- 12) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II

PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

2.1 PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2019-2020

Dalam pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Tahun 2019-2020, alokasi anggaran Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dialokasikan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Kegiatan pembangunan tersebut antara lain pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pengadaan dan pemasangan ATCS, dan pengembangan aplikasi lacak trans, sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tahun	Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Raya Transyogi (Nomor Ruas 097), Jalan Letda Natsir (Nomor Ruas 097), Jalan Raya Cimanggis- Nagrak (Nomor Ruas 097)	Rp. 2.846.000.000
2020	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Raya Ciawi-Benda (Nomor Ruas 025)	Rp. 2.417.700.000
2020	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Raya Cigelug (Bts. Banten) -Jasinga(Nomor Ruas 021)	Rp. 2.577.900.000
2020	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan di Ruas Jalan Bekasi - Tambun Cikarang (Bts. DKI Jakarta-Bekasi-Bts.Bekasi/Karawang) (Nomor Ruas 001, 002,003)	Rp. 3.808.300.000
2020	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan RayaTajur (Nomor Ruas 024)-Jalan Raya Pajajaran (Nomor Ruas 073)-Jalan Raya Kedunghalang (Nomor Ruas 073)	Rp. 1.673.000.000

2.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN

1. Capaian Pengadaan Dan Pengawasan Perengkapan Jalan (2019-2020)

Pada Tahun 2019, lanjutan pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar dilaksanakan di area Gedung Kedatangan AKAP, Gedung Keberangkatan AKAP, Selasar dari area Gedung AKAP menuju Hall Utama, Instalasi Pengolahan Air Limbah, serta Pembangunan Masjid



Pembangunan Gedung Kedatangan AKAP



Pembangunan Gedung Keberangkatan AKAP



Selasar dari Area Gedung AKAP menuju Hall Utama



Pembangunan Masjid Terminal Jatijajar



Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pada Tahun 2020, menggunakan dana optimalisasi anggaran, BPTJ melakukan pengadaan fasilitas parkir sepeda dan Pemasangan PJU di Terminal Jatijajar.



Fasilitas Parkir Sepeda

Selain itu pada Tahun 2020, dengan menggunakan optimalisasi anggaran penanganan COVID-19, dilakukan pekerjaan emplasmen di area keberangkatan Gedung AKAP. Kegiatan ini untuk menunjang pelaksanaan *social distancing* di area Terminal Jatijajar. Saat ini seluruh penumpang AKAP dan AKDP menunggu di area keberangkatan Hall AKDP. Diharapkan dengan selesainya pekerjaan emplasment di area Gedung AKAP, maka penumpang AKAP dapat menggunakan gedung Keberangkatan terpisah dengan penumpang AKDP sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan *Social Distancing*



Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP yang Saat ini digunakan untuk AKAP dan AKDP Kapasitas Terbatas dengan Penerapan Tempat Duduk Social Distancing



Ruang Tunggu Keberangkatan AKAP yang belum dioperasikan menunggu pekerjaan emplasement Gedung Keberangkatan



Letak Pekerjaan EmplACEMENT

2. Capaian Pembangunan Terminal Tipe A Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan

Pada Tahun 2020, menggunakan dana optimalisasi anggaran, BPTJ melakukan pengadaan fasilitas parkir sepeda dan Pemasangan PJU di Terminal Pondok Cabe.



Fasilitas Parkir Sepeda



Pemasangan PJU (3 Unit Baru & 8 Armatur)

Tahun	Kegiatan	Keterangan
2017	Reviu DED Terminal Poris Plawad	Terminal Poris Plawad
2017	FS dan Basic Design Pengembangan Terminal Tipe A di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang
2017	Pembangunan sistem monitoring angkutan penumpang terminal Jatijajar	Terminal Jatijajar
2018	Pembangunan Terminal Tipe A Jabodetabek	Terminal Jatijajar
2018	Pendanaan Kegiatan operasional perkantoran pengelolaan terminal tipe A di Jabodetabek	Terminal Jatijajar
2019	Lanjutan pembangunan terminal tipe A Jatijajar	Terminal Jatijajar
2019	Reviu DED Lanjutan pembangunan terminal Jatijajar untuk pembangunan TOD	Terminal Jatijajar

Tahun	Kegiatan	Lokasi
2017	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (6 ruas jalan, 1 jalan nasional, 7 supervisi)	Ruas Bekasi, Tambun, s.d. Cikarang Ruas jalan Ciputat, Kemang s.d. Kedunghalang Ruas Jalan Raya Bogor (Batas DKI Jakarta s.d. batas Jawa Barat) Ruas Jalan Daan Mogot Ruas Jalan Raya Serang (Tangerang) Ruas jalan Nasional di Kota Depok Pengadaan dan pemasangan marka jalan di jalan nasional
2018	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan (7 ruas, 7 supervisi)	Ruas Jalan Nasional Ciledug-Jasinga (Kode Ruas 021) Ruas Jalan Nasional Bts. Jasinga – Leuwiliang (Kode Ruas 022) Ruas Jalan Nasional Bts. Leuwiliang – Jl.Abd. Bin Nuh (Kode Ruas 023) Ruas Jalan Nasional Transyogi (Kode Ruas 097) Ruas Jalan Nasional Ciawi-Benda (Kode Ruas 025) Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak (Kode Ruas 022)
2019	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan di ruas jalan nasional Jabodetabek (6 ruas, 6 supervisi, 2 ruas marka, alat pengatur kinerja lalu lintas 3 wilayah)	Ruas Jalan Raya Serang Ruas Jalan Nasional di wilayah Tangerang Ruas Jalan Bekasi Tambun Cikarang Ruas Jalan Raya Bogor Ruas Jalan Bts. DKI Jakarta, Banten Ruas Jalan Nasional di wilayah Kota Depok

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2021

3.1 PERUBAHAN REDESIGN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan anggaran, pemerintah melakukan reformasi belanja negara dalam rangka efisiensi belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas yang menekankan pada anggaran yang berbasis hasil (*result based*) serta penguatan kebijakan *countercyclical*, maka pemerintah melakukan redesign sistem perencanaan dan anggaran yang berlaku efektif pada TA 2021. Redesign sistem perencanaan dan penganggaran berfokus kepada 5 (lima) prioritas pembangunan 2020-2024, yang terdiri dari : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Redesign sistem perencanaan dan penganggaran penting dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan antara Kementerian/Lembaga, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar Kementerian/Lembaga, mewujudkan implementasi *money follow program* dan mengurangi *cost of bureaucracy* dengan penggunaan satu program oleh beberapa unit kerja eselon1.

Amanat pemerintah untuk melaksanakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam Surat Edaran Bersama Nomor S-375/MK.02/2020 dan B-308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga TA.2021. Amanat ini ditindaklanjuti dengan melakukan melakukan perumusan nomenklatur outcome, indikator kinerja utama

program, output program, dan penyusunan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Perhubungan termasuk BPTJ telah melakukan penyusunan redesain output Kementerian/Lembaga mengacu pada hasil pemetaan atas keluaran rancangan Renja Kementerian/Lembaga dalam daftar KRO dan RO. Kementerian Perhubungan termasuk BPTJ juga telah melakukan penyesuaian data dan informasi mengenai keluaran pada Sistem Informasi KRISNA-RENJA dan Sistem Informasi SAKTI Kementerian Keuangan. Keluaran kedua aplikasi tersebut dijadikan lampiran dalam dokumen Renja Kementerian Perhubungan dan BPTJ.

3.2 SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPTJ TAHUN 2021

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan khususnya dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat baik di di perkotaan maupun di perdesaan. Pengembangan sistem transportasi sangat penting dilakukan untuk melayani konektivitas perkotaan. Sistem transportasi di kawasan perkotaan semestinya harus *smart, integrated* serta *sustainable* sehingga meminimalkan perjalanan masyarakat, serta membuat angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Kementerian Perhubungan khususnya BPTJ berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, kehandalan pelayanan transportasi dan ketersediaan kapasitas sarana dan prasarananya.

Program BPTJ terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis BPTJ adalah GA. Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Nasional, sedangkan program generic BPTJ adalah WA. Program dukungan manajemen. Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Nasional terdiri dari beberapa sasaran program dan output program, antara lain :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi Nasional

Output Program : Terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek

2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan

Output Program : Terwujudnya kinerja layanan transportasi Jabodetabek

3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Output Program : Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 (satu) sasaran program dan output program, yaitu:

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Output Program : Terwujudnya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sasaran Kegiatan BPTJ antara lain :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi perkotaan yang terpadu
2. Meningkatnya kinerja layanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek
3. Meningkatnya kinerja layanan lalu lintas perkotaan di wilayah Jabodetabek
4. Terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan di wilayah Jabodetabek
5. Meningkatnya sarana, prasarana, dan fasilitas keselamatan dan keamanan di wilayah Jabodetabek
6. Terlaksananya perencanaan transportasi perkotaan
7. Meningkatnya kualitas SDM BPTJ dalam bidang transportasi
8. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transportasi Jabodetabek

3.3 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2021

Target kinerja BPTJ tahun 2021 dipisahkan antara program konektivitas transportasi Jabodetabek dan program dukungan manajemen. Masing-masing target kinerja dalam kedua program tersebut dijabarkan dalam table sebagaimana berikut:

TARGET KINERJA PROGRAM KONEKTIVITAS TRANSPORTASI

Kode	Sasaran Strategis/ Sasasaran program/indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2021
SS 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional		
IKSS 1.5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,455
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek		
IKP1	Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	rasio	0,36
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaan yang Terpadu		
IKK 1	Modal Share Angkutan Umum Berbasis Jalan	%	32
IKK 2	Modal Share Angkutan Umum Berbasis Rel	%	6
IKK 3	Persentase Akses Pejalan Kaki ke Angkutan Umum Dengan Jarak Maksimal 500 Meter	%	38
IKK4	Persentase Simpul Transportasi Perkotaan dengan Fasilitas Pejalan Kaki dan Fasilitas Parkir Pindah Moda (Park and Ride) dengan Jarak Perpindahan Antarmoda Tidak Lebih dari 500 M	%	70
SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan		
IKSS 2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat	Indeks	74
SP 2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek		
IKP 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	nilai	78
SK 2	Meningkatnya Kinerja Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek		
IKK 5	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Mencapai 80 % (Delapan Puluh Persen dari Panjang Jalan)	%	71

Kode	Sasaran Strategis/ Sasasaran program/indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2021
IKK 6	Rasio Perjalanan dengan Perpindahan Moda Angkutan Umum dalam Satu Kali Perjalanan Maksimal 3 (tiga) Kali	rasio	0,92
IKK 7	Persentase Realisasi Pemanfaatan Pendanaan Transportasi Jabodetabek	%	10
IKSS 2.9	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
SP 2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek		
IKP 2.2	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	75
SK 3	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas Perkotaan di Wilayah Jabodetabek		
IKK 8	Kecepatan Rata - rata Kendaraan pada Jam Puncak	km/jam	25
IKK 9	Persentase Penurunan Gangguan Perjalanan Kereta Api Perkotaan	%	70
IKK 10	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di Wilayah Jabodetabek	%	45
SS 3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi		
IKSS 3.2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	rasio	0,02
SP 3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi-Jabodetabek		
IKP 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	rasio	0,02
SK 4	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan di Wilayah Jabodetabek		
IKK 11	Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan berdasarkan Rekomendasi SID / Perencanaan MRL di Wilayah Jabodetabek	%	82
SP 4	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek		
IKP 4	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Rasio	1
IKP 4	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Konektivitas, Pelayanan, dan Keselamatan Perkeretaapian	Tahun	1
SK 5	Terlaksananya Perencanaan Transportasi Perkotaan Jabodetabek		

Kode	Sasaran Strategis/ Sasasaran program/indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2021
IKK 12	Rasio Pemenuhan Dokumen Perencanaan Transportasi Jabodetabek	rasio	1
SK 6	Meningkatnya Kualitas SDM BPTJ dalam Bidang Transportasi		
IKK 13	Rasio Pegawai BPTJ yang mengikuti Bimbingan Teknis Transportasi	rasio	1
SK 7	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi		
IKK 14	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Menerapkan SMK di Jabodetabek	%	67
IKK 15	Persentase Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang Layak Beroperasi	%	39
IKK 16	Persentase Pemenuhan Kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	%	100
SK 8	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Transportasi Jabodetabek		
IKK 17	Rasio Pemenuhan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transportasi Jabodetabek	rasio	1

TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kode	Sasaran Strategis/ Sasasaran program/indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2021
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SP 5	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
IKP 5	Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	86
SK 9	Meningkatnya Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
IKK 18	Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	81
IKK 19	Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	3,15
IKK 20	Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	73

Kode	Sasaran Strategis/ Sasasaran program/indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2021
SK 10	Meningkatnya Kapabilitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
IKK 21	Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	68
IKK 22	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	75
IKK 23	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	87
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
IKK 24	Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	3,7
SK 12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
IKK 25	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	100

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2021 BPTJ

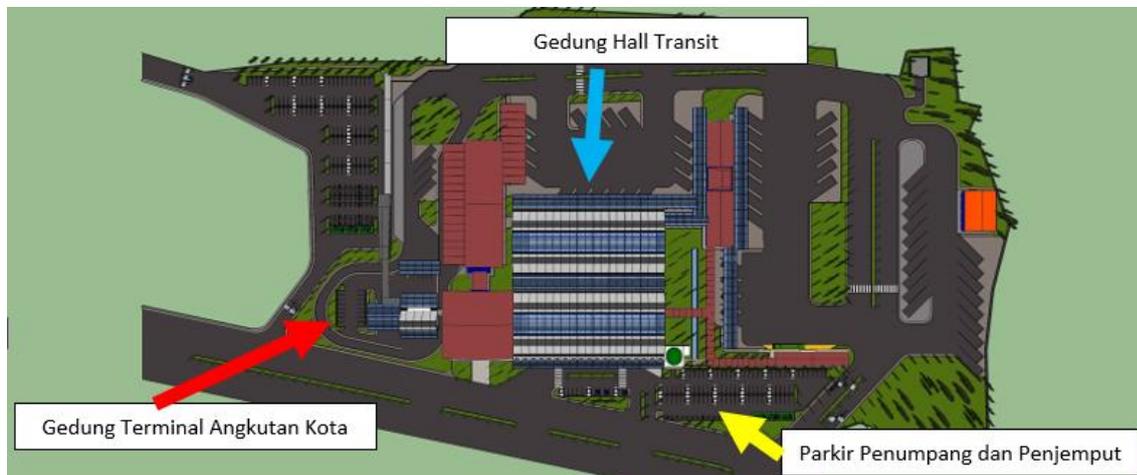
Program dan Kegiatan Prioritas BPTJ tahun 2021 antara lain :

1. Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna Terminal Tipe A Jatijajar, pada Tahun 2021 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan meningkatkan fasilitas berupa pembangunan Hall Transit serta Pembangunan Gedung Loker/Terminal Angkot



Layout Eksisting Terminal Tipe A Jatijajar



Layout Rencana Pengembangan Terminal Tipe A Jatijajar



Rencana Pembangunan Gedung Hall Transit



Rencana Pembangunan Terminal Angkutan Kota

2. Pembangunan Terminal Tipe A Pondok Cabe

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna Terminal Tipe A Pondok Cabe, pada Tahun 2021 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan meningkatkan fasilitas berupa pembangunan Terminal Angkutan Kota dan Transjakarta, serta skybridge menuju Terminal Utama



Kondisi Eksisting Terminal Pondok Cabe (Area Terminal Angkutan Perkotaan dan Transjakarta)



Kondisi Rencana Pembangunan Terminal Angkutan Perkotaan serta
Transjakarta dan Skybridge

3. Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Jabodetabek
4. Pengadaan dan Perlengkapan Jalan pada ruas jalan nasional
 - Ruas Jalan Cigelung (Bts. Banten) - Jasinga (Nomor Ruas 021)
 - Ruas Jalan Batas Leuwiliang - Jalan Abd. Bin Nuh (Kode Ruas 023)
 - Ruas Jalan Raya Ciawi - Benda (Kode Ruas 025)
 - Ruas Jalan Ciawi – Puncak (Kode Ruas 074)
 - Ruas Jalan Raya Tajur (024) - Jalan Raya Pajajaran (073) - Jalan Raya Kedunghalang (073)
 - Ruas Jalan Bts Depok/Bogor – Bogor (Nomor Ruas 012)
 - Ruas Jalan Bekasi - Tambun Cikarang (Bts. DKI Jakarta/Bekasi – Bts. Bekasi/Karawang) (Nomor Ruas 001, 002, 003)
 - Ruas Jalan Nasional Wilayah Kota Depok (Nomor Ruas 099, 100)
 - Jalan Nasional Wilayah Kota Tangerang (Nomor Ruas 003,004)
 - Ruas Jalan Raya Serang (Bts. Kota Serang - Bts. Kota Tangerang) (Nomor Ruas 003)
 - Ruas Jalan Bts. DKI Jakarta/Banten - Bts. Depok/Bogor (Ciputat - Parung) (Nomor Ruas 018, 069)

- Ruas Jalan Raya Bogor (Gandaria/Bts. DKI Jakarta - Kedunghalang/Bts. Bogor) (Nomor Ruas 072, 073)

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan)
1.	Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar	49.000.000
2.	Pembangunan Terminal Tipe A Pondok Cabe	14.399.398
3.	Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Jabodetabek	15.000.000
4.	Pengadaan dan Perlengkapan Jalan pada ruas jalan nasional	16.291.220

3.5 ISU STRATEGIS TAHUN 2021

Isu Strategis tahun 2021 dalam rangka pelayanan transportasi umum di Jabodetabek dimana dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, antara lain:

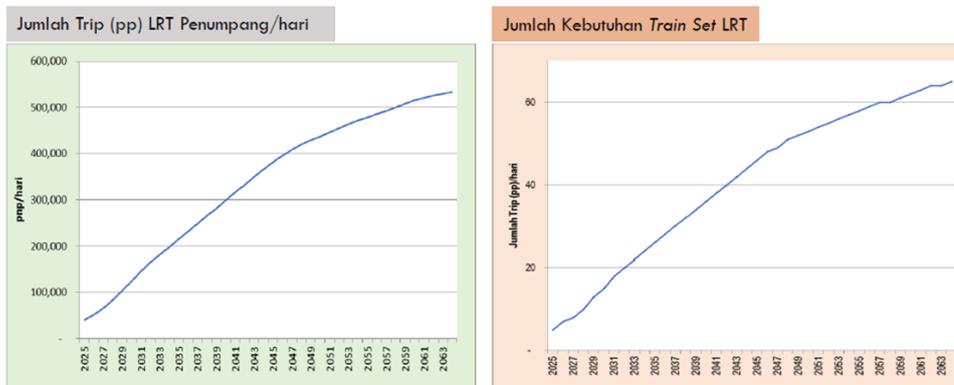
- Peningkatan moda share saat pandemi COVID19 di 2021 (ketersediaan layanan, kebijakan baru dalam bertransportasi seperti pembatasan kapasitas angkutan umum, perilaku pengguna angkutan umum,)
- Penanganan kemacetan wilayah -wisata puncak-diganti- di 2021 (terdiri dari layanan melalui BTS, penyediaan informasi lalu lintas melalui ATCS, penyediaan halte yg support dengan layanan BTS, TDM melalui GAGE mingguan kawasan puncak)
- Peningkatan Moda Share Angkutan Umum (push and pull jabodetabek)
- tema untuk Kereta komuter bisa TOD / green transportation data source : study2 dari prasarana (prasarana)

1. Rencana Strategi Pendanaan LRT Cibubur - Bogor dengan Bundling TOD

Lintasan LRT koridor Cibubur-Bogor akan dibangun sepanjang 28,9 Km, dengan titik-titik tersebar sepanjang ruas jalan tol jagorawi, mulai dari Cibubur (DKI Jakarta) hingga Baranangsiang (Kota Bogor)



Pada Tahun pertama operasi (Tahun 2025), pelayanan LRT Koridor Cibubur-Baranangsiang (Kota Bogor) diperkirakan akan melayani 30.736 orang/hari dengan rata-rata 5 trip/hari. Angka tersebut diproyeksikan mengalami pertumbuhan mencapai 411.768 orang/hari dengan total 65 trip PP/hari pada tahun 2064



Kebutuhan Biaya Prasarana

No	Item Biaya	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Harga
1	Desain Teknis + Supervisi	Ls	1	1.50%	122,797,500,000
2	Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan Rel	Ls	1	10.00%	818,650,000,000
3	Konstruksi Jalan Rel *)	km	28.9	266,750,000,000	7,709,075,000,000
5	Stasiun Besar	Buah	2	155,000,000,000	310,000,000,000
6	Stasiun Antara	Buah	6	85,000,000,000	510,000,000,000
7	Depo	Buah	1	575,000,000,000	575,000,000,000
8	Sintelis	km	28.9	145,000,000,000	4,190,500,000,000
9	Bangunan admin	Ls	1	25,000,000,000	25,000,000,000
10	Pembebasan Lahan	m ²	203138	5,000,000	1,015,690,000,000
TOTAL					15,276,712,500,000

Keterangan:

*) termasuk stabling bay, jalur perpindahan dan railway system

*Sumber : Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor (BPTJ,2019)
Dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT Cibubur - Baranangsiang Kota Bogor, serta terdapat potensi pengembangan TOD maka alternatif pembiayaan perlu dikembangkan, agar APBN dapat membiayai infrastruktur transportasi lainnya. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan mengkaji apabila Pendanaan LRT Cibubur - Bogor Bundling dengan TOD. Diperlukan kajian secara mendalam dari segi aspek legalitas dan aspek teknis untuk dapat melaksanakan skema pendanaan tersebut

2. *Green Transportation*

Operasional Terminal Tipe A di Jabodetabek saat ini memerlukan energi listrik yang cukup besar. Sebagai salah satu strategi untuk menerapkan *eco building* di Terminal Tipe A selain penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kajian mengenai penerapan energi terbarukan juga diperlukan. Selain itu untuk mendukung Perpes 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik saat ini pengendara pribadi dan operator bus sudah mulai menggunakan kendaraan berbasis listrik. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan prasarana pendukung agar penggunaan kendaraan berbasis listrik dapat berkelanjutan, dalam studi ini akan dikaji kelayakan apabila instalasi charging station diterapkan di Terminal



3. BTS Puncak

Dengan menggunakan sistem informasi geografi, beberapa analisa seperti analisa jarak berjalan kaki dari setiap bangunan, analisa kepadatan bangunan, analisa ketersediaan trayek feeder serta analisa pusat aktifitas, dilakukan overlay atas analisa-analisa tersebut. Berdasarkan overlay analisa, didapatkan 20 lokasi potensial untuk penempatan halte dari Ciawi hingga Cipanas. Terhadap lokasi-

lokasi potensial tersebut dianalisa kembali dimensi halte yang diperlukan menggunakan indikator besarnya permintaan, potensi bangkitan tarikan, geometri jalan, kinerja jalan dan ketersediaan rute angkutan umum lain



- Akan mengukung konsep transportasi ramah lingkungan dengan rencana pembangunan Jalur Pesepeda di Kota Bekasi dan Kota Bogor, serta dilakukan penyusunan FS dan DED Instalasi Panel Surya dan Charging Station kendaraan berbasis listrik

BAB IV

PENUTUP

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021 masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kualitas keamanan dan keselamatan, belum optimalnya kapasitas prasarana transportasi dalam menunjang konektivitas dan sistem logistik nasional khususnya untuk pelayanan transportasi massal perkotaan, transportasi untuk daerah terpencil, pedalaman, rawan bencana dan wilayah terluar.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021 ini tergantung pada komitmen, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para penyelenggara pemerintahan di sektor transportasi dan dukungan dari para penyelenggara negara lainnya serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor transportasi yang optimal, mampu menggerakkan pertumbuhan wilayah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.